



## Peran Masyarakat Dalam Fase Tanggap Darurat: Studi Kasus Pada Banjir Gresik

Risma Dwiyana Arianty<sup>1</sup>, Ahmad Zaki<sup>2</sup>, Sagita Happy Arida<sup>3</sup>, Aliyah Rifdatul Nabilah<sup>4</sup>, Talitha Rifqi Risqulloh<sup>5</sup>, Muhammad Naufal Firzatulloh<sup>6</sup>, Nuh Krama Hadianto<sup>7</sup>, M. Noer Falaq Al Amin<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup> Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Surabaya

<sup>1</sup>[24040674177@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674177@mhs.unesa.ac.id), <sup>2</sup>[24040674182@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674182@mhs.unesa.ac.id), <sup>3</sup>[24040674183@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674183@mhs.unesa.ac.id),

<sup>4</sup>[24040674188@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674188@mhs.unesa.ac.id), <sup>5</sup>[24040674197@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674197@mhs.unesa.ac.id), <sup>6</sup>[24040674203@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674203@mhs.unesa.ac.id),

<sup>7</sup>[nuhhadianto@mhs.unesa.ac.id](mailto:nuhhadianto@mhs.unesa.ac.id), <sup>8</sup>[noerfalaqalamin@mhs.unesa.ac.id](mailto:noerfalaqalamin@mhs.unesa.ac.id)\*

### Abstrak

Bencana banjir merupakan fenomena berulang yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah yang secara geografis rentan terhadap luapan sungai. Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menjadi salah satu daerah yang konsisten mengalami peningkatan frekuensi akibat banjir dari tahun ke tahun, terutama akibat meluapnya Kali Lamong. Artikel ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menggambarkan peran masyarakat dalam fase tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Gresik sebagai respons komunitas sebelum ada intervensi formal dari pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (library reserach) melalui analisis terhadap berbagai sumber data sekunder, mencakup laporan resmi, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan referensi akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat berperan sebagai aktor utama dalam fase tanggap darurat, meliputi: (1) pelaksanaan evakuasi mandiri memprioritaskan kelompok rentan; (2) pembentukan pola inisiatif melalui pendirian posko darurat dan dapur umum; serta (3) penguatan kerjasama antara tokoh masyarakat dengan organisasi lokal. Meskipun demikian respons masyarakat masih mengalami beberapa kendala, antara lain keterbatasan sarana evakuasi, distribusi logistik yang tidak merata, hambatan komunikasi dan koordinasi, serta terbatasnya akses fisik akibat genangan. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan kemampuan kelembagaan masyarakat melalui pembentukan kelompok siaga bencana, simulasi evakuasi, dan kolaborasi multi aktor merupakan strategi yang tepat dalam meningkatkan efektivitas respons darurat berbasis komunitas.

Kata Kunci: Tanggap Darurat; Bencana Banjir; Peran Masyarakat; Kabupaten Gresik; Kesiapsiagaan Bencana

### 1. Pendahuluan

Bencana alam adalah salah satu fenomena yang dapat terjadi setiap saat, dimanapun dan kapanpun sehingga menimbulkan risiko atau bahaya terhadap kehidupan manusia, baik kerugian harta benda maupun korban jiwa manusia (Fazaina, at al., 2015). Bencana alam yang terjadi di suatu wilayah tentu memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam upaya mengurangi dan mencegah risiko bencana menjadi hal yang sangat penting, terutama melalui peningkatan kesadaran serta kapasitas individu dan kelompok (Suryanti, et al., 2010: 32).

Masyarakat merupakan pihak yang memiliki pengalaman langsung dalam kejadian bencana sehingga pemahaman yang dimiliki menjadi modal bagi pengurangan resiko bencana. Pemahaman masyarakat terkait strategi adaptasi akibat ancaman dampak bencana teraktualisasi dalam bentuk persepsi dan tindakan. Persepsi mencerminkan bagaimana masyarakat mampu memahami risiko bencana dan bagaimana mereka mereka mampu bertindak dalam upaya penanggulangan bencana. Menurut (Arif, 2020 ; Nursyabani, 2022) masyarakat merupakan faktor kunci dalam sistem penanggulangan risiko bencana, karena masyarakat merupakan pihak yang hidup di sekitar lokasi bencana dan mengalami dampak secara langsung. Hasil dari persepsi dan tindakan masyarakat tercermin dalam bentuk strategi adaptasi berupa penyesuaian akibat dari ancaman dampak bencana.

Secara geografis, nyaris seluruh daerah provinsi Jawa Timur menjadi daerah yang rawan. Hal ini berpotensi mendukung peristiwa bencana alam seperti tanah longsor, angin puting beliung, banjir, gempa, dan lain sebagainya. Banjir merupakan sebuah permasalahan yang ditandai dengan tingginya curah hujan dan adanya genangan air melebihi batas wajar di suatu wilayah. Banjir sendiri menjadi masalah sosial yang tentunya sangat merugikan masyarakat. Banjir sering terjadi di wilayah Indonesia, terlebih di wilayah yang memiliki kepadatan penduduk (Safitri, et al., 2022). Banjir menjadi salah satu peristiwa bencana alam yang seringkali terjadi di Jawa Timur, terutama di daerah-daerah yang dataran rendah. Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah di

Jawa Timur yang sering mengalami bencana banjir. Bahkan banjir sudah menjadi bencana rutin yang melanda Kabupaten Gresik.

Kali Lamong adalah salah satu sungai yang terletak di Jawa Timur, Indonesia. Sungai ini memiliki panjang sekitar 80 kilometer dan mengalir melalui beberapa kota, termasuk Kota Surabaya, Kota Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo. Saat curah hujan tinggi atau luapan air pasang terjadi, sungai ini bisa meluap dan menyebabkan banjir di daerah sekitarnya. Banjir di Kali Lamong dapat menjadi ancaman bagi masyarakat dan infrastruktur yang berada di sepanjang aliran sungai. Salah satu daerah aliran sungai Kali Lamong yang sering mengalami banjir yaitu Kabupaten Gresik. Daerah pada Kabupaten Gresik yang biasanya mengalami bencana banjir yaitu: Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Menganti, Cerme dan Driyorejo (Melalui & Kelembagaan, 2015)

Gejala banjir biasa ditandai dengan tingginya curah hujan dan terjadi secara terus menerus. (Aulady, et al., 2022). Gejala tersebut kemudian menjadi faktor utama dari terjadinya banjir. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) sendiri, daerah Gresik menjadi wilayah yang memiliki bencana banjir cukup tinggi di tahun 2023, yakni hampir mencapai angka 100 total bencana banjir yang terjadi di seluruh kecamatan di Gresik.

Tabel 1. Tabel Data Bencana Banjir di Kabupaten Gresik

2020	2021	2022	2023
53	62	83	90

Banjir yang terjadi di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan tiap tahunnya sejak tahun 2020 hingga 2023. Dimana, pada tahun 2020 terdapat total 53 bencana banjir yang terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Gresik, 62 di tahun 2021, 83 di tahun 2022, serta di tahun 2023 yang mencapai angka 90 total banjir yang terjadi. Melihat dari peningkatan ini, menandakan bahwasanya banjir yang terjadi di Kabupaten Gresik setidaknya telah memberikan wawasan bagi warganya untuk tahu hal-hal apa saja yang harus dilakukan saat bencana banjir terjadi di sekitar mereka.

Studi mengenai banjir di Kabupaten Gresik telah banyak dilakukan. Seperti studi oleh Firrizqi, et al., (2024) yang berfokus pada peran Taruna Siaga Bencana (Tagana) terhadap bencana banjir di Kabupaten Gresik dan menilai bahwasanya peran Tagana memang membantu, namun masih memiliki kendala. Sedangkan di sisi lain, peran BPBD juga ikut disorot dalam studi oleh Sari, et al (2020) terhadap bencana banjir di Kabupaten Gresik. Namun, belum terdapat studi yang mengupas bagaimana peran masyarakat setempat ketika bencana banjir terjadi. Oleh sebab itu, artikel ini akan memperhatikan bagaimana peran warga Kabupaten Gresik dalam menanggapi atau bertindak ketika bencana banjir terjadi di daerahnya.

Selain itu, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir pada dasarnya telah mengembangkan berbagai bentuk adaptasi sosial sebagai respons terhadap kondisi lingkungan yang terus berulang. Adaptasi tersebut dapat berupa tindakan sederhana seperti meninggikan lantai rumah, membuat tanggul darurat, memindahkan barang berharga ke tempat yang lebih aman, hingga membangun sistem komunikasi antarwarga ketika debit air mulai meningkat. Bentuk-bentuk adaptasi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi korban bencana, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bertahan dan menyesuaikan diri terhadap ancaman lingkungan yang dihadapi. Menurut Adger (2000), kemampuan adaptasi masyarakat merupakan bagian penting dari resiliensi sosial dalam menghadapi risiko bencana. Oleh karena itu, pemahaman terhadap strategi masyarakat lokal menjadi penting dalam upaya pengurangan risiko banjir secara berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir juga dapat dilihat melalui kegiatan gotong royong dan solidaritas sosial yang terbentuk di lingkungan sekitar. Ketika banjir terjadi, masyarakat biasanya saling membantu dalam proses evakuasi, distribusi bantuan, maupun pembersihan lingkungan pascabanjir. Nilai solidaritas tersebut menjadi modal sosial yang sangat penting dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana. Putnam (2000) menjelaskan bahwa modal sosial berupa kepercayaan, jaringan sosial, dan kerja sama antar anggota masyarakat mampu meningkatkan efektivitas tindakan kolektif dalam menghadapi permasalahan sosial, termasuk bencana alam. Dengan adanya keterlibatan masyarakat secara aktif, proses penanggulangan bencana dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Di sisi lain, peningkatan frekuensi banjir di Kabupaten Gresik juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan dan aktivitas manusia. Alih fungsi lahan, buruknya sistem drainase, pendangkalan sungai, serta meningkatnya pembangunan di daerah resapan air menjadi faktor yang memperbesar potensi banjir di kawasan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan banjir tidak hanya disebabkan oleh faktor alam semata, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam memanfaatkan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga penanggulangan bencana, dan masyarakat dalam menciptakan sistem mitigasi yang lebih terintegrasi. Edukasi mengenai kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan lingkungan yang baik menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui bagaimana bentuk peran dan tindakan masyarakat Kabupaten Gresik dalam menghadapi bencana banjir yang terjadi secara rutin. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai strategi adaptasi masyarakat, bentuk partisipasi sosial, serta faktor-faktor yang memengaruhi kesiapsiagaan warga dalam menghadapi banjir. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dengan kajian kepustakaan (library research) dimana penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran masyarakat dalam fase tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Gresik dan untuk memberikan deskripsi yang lebih mendalam tentang peran tersebut. Kajian kepustakaan adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis, termasuk referensi, buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya Yaniawati (2020). Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yang melibatkan membaca berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan resmi, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan referensi akademik lainnya yang relevan dengan subjek penelitian.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1. Kondisi Tanggap Darurat Banjir di Gresik**

Banjir di Kabupaten Gresik merupakan bencana berulang yang kerap terjadi pada musim hujan. Penyebabnya sebagian besar dipicu oleh meluapnya Kali Lamong akibat tingginya debit air yang tidak mampu ditampung oleh kapasitas sungai. Pada 2026, luapan Kali Lamong memicu genangan di beberapa desa yang meliputi Desa Jombangdelik, Ngampel, Dapet, Wotansari, Pucung, Sekarputih, Banjaragung, Karangsemanding, Deliksumber, Lundo, dan Sedapurklagen. Pada saat yang sama, luapan Kali Surabaya juga berdampak pada Desa Driyorejo, Desa Cangkir, Sumpat, dan Wringinanom. Sebaran wilayah terdampak tersebut menunjukkan bahwa banjir tidak hanya terkonsentrasi pada satu aliran sungai, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi hidrologi lokal dan sistem drainase yang berbeda di tiap daerah.

Kondisi banjir membuat perubahan yang berlangsung cepat, terutama di wilayah yang terdampak luapan sungai. Air masuk ke pemukiman dalam waktu singkat setelah debit meningkat, tanpa banyak ruang bagi masyarakat untuk melakukan persiapan. Dampak yang muncul memberikan gangguan langsung terhadap aktivitas masyarakat. Di kawasan Balongpanggung dan Benjeng, genangan air masuk ke pemukiman warga dan merendam jalan desa sehingga menghambat mobilitas antarwilayah dan fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan layanan kesehatan. Di wilayah dengan genangan yang lebih tinggi akses terbatas, mobilitas menjadi sulit sehingga membutuhkan bantuan alat seperti perahu untuk menjangkau titik tertentu. Banjir juga telah menyebabkan lahan pertanian di sejumlah desa tergenang sehingga tidak dapat dimanfaatkan, yang secara langsung mempengaruhi keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat. Di wilayah Driyorejo dan Wringinanom, genangan lebih banyak dipicu oleh curah hujan tinggi dan sistem drainase yang tidak mampu menampung limpasan air. Hal tersebut menyebabkan air bertahan di lingkungan permukiman dalam durasi yang cukup lama sehingga menghambat aktivitas warga sekitar.

Dalam menangani permasalahan banjir, penanganan awal dilakukan melalui koordinasi antara BPBD, pemerintah desa, dan pihak-pihak terkait dengan menyesuaikan langkah berdasarkan kondisi lapangan di masing-masing wilayah terdampak. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemantauan ketinggian air, pendataan desa-desa terdampak, serta penyiapan bantuan dasar yang disalurkan secara bertahap. Di beberapa titik, petugas dan warga juga siaga untuk membantu mobilitas warga terdampak dan memastikan kondisi tetap terkendali, terutama pada wilayah

dengan genangan tinggi yang belum surut. Kondisi tanggap darurat yang terjadi juga tidak lepas dari karakter wilayah dan sistem penanganan. Perbedaan sumber banjir antara luapan sungai dan genangan telah menunjukkan bahwa penyebab banjir tidak hanya pada kapasitas sungai, tetapi juga bisa terjadi karena sistem drainase, tata guna lahan, serta keterhubungan infrastruktur antar wilayah yang kurang baik.

### **3.2. Peran Awal Masyarakat Dalam Tanggap Darurat**

Pada saat banjir mulai terjadi, respons paling awal justru muncul dari masyarakat setempat sebelum bantuan formal hadir secara menyeluruh. Hal ini terjadi karena saat fase tanggap darurat itu terjadi pertolongan pertama adalah dari masyarakat sekitar. Dengan respon ini maka sangat membantu pemerintah dalam mengevakuasi warga rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga yang sedang sakit. Dalam situasi awal tanggap darurat bencana masyarakat menjadi aktor pertama yang memiliki responsibilitas yang tinggi seperti Ketua RT/RW, Kepala Desa, Karang Taruna (Pemuda) dan organisasi masyarakat lainnya (Ferian et al, 2025). Bentuk awal aksi atau peran dari masyarakat dalam mengatasi situasi awal tanggap darurat bencana adalah sebagai berikut:

#### **3.2.1 Membantu Evakuasi Warga Ke Tempat Yang Lebih Aman**

Masyarakat sebagai garda awal dalam situasi tanggap darurat bencana khususnya banjir. Hal pertama yang pasti akan dilakukan adalah dengan membantu mengevakuasi warga yang rentan dan paling terdampak akan adanya bencana. Aktivitas awal ini tentu sangat membantu pihak satgas bencana dari pemerintah misal BPBD dan BASARNAS.

#### **3.2.2 Memberi Perhatian Khusus Pada Kelompok Rentan**

Dalam proses evakuasi tentu kelompok rentan menjadi prioritas utama untuk dibantu dalam proses evakuasi. Hal ini tentu dilakukan agar meminimalisir jatuhnya korban pada kelompok rentan. Melalui prioritas kelompok rentan ini juga tentu sangat membantu tim satgas tanggap bencana dari pemerintah dan mempercepat proses evakuasi karena adanya sinergitas antara masyarakat dan tim satgas. Kelompok rentan yang menjadi prioritas adalah Lansia, Anak-Anak, dan Warga yang menderita sakit berat.

Dalam situasi tanggap darurat ini dan juga melalui kedua poin diatas dapat dikatakan bahwa gotong-royong atau upaya saling membantu sesama warga menjadi peran awal yang utama pada masyarakat dalam membantu pemerintah dalam mengatasi bencana di daerah. Selain itu, mayoritas aktivitas masyarakat dalam menghadapi bencana adalah dengan membuat rencana siap siaga bencana (khususnya di daerah rawan bencana), saling gotong royong, dan partisipasi warga yang aktif dalam menangani bencana (Putri, et al 2025). Dengan demikian dalam konteks penanganan bencana khususnya Bencana Banjir (Khususnya di Kabupaten Gresik), Secara umum masyarakat yang terdampak tidak hanya sebagai korban namun justru peran awal tanggap darurat dari masyarakat menjadi hal utama yang harus dilakukan ketika bencana itu terjadi. Peran masyarakat pada awal fase terjadinya bencana menjadi sangat krusial karena ketika bantuan dari pemerintah secara formal belum hadir maka bantuan dan dukungan dari masyarakat tentu sangat diperlukan dalam tanggap awal bencana.

### **3.3 Pola Inisiatif Dan Kerja Sama Masyarakat**

Dalam fase tanggap darurat bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Gresik, pola inisiatif masyarakat cenderung reaktif dan sesuai dengan situasi yang terjadi namun tindakan yang dilakukan masih terstruktur seperti pola pembagian tugas yang rapi antar RT dan RW, saling gotong royong dan membuat posko mandiri untuk kesiapsiagaan bencana. Peran kerjasama masyarakat juga secara kolektif mengorganisasikan setiap kelompok masyarakat guna memastikan pembagian tugas dan kerja berjalan sesuai dengan mekanisme kesiapsiagaan bencana yang telah ditentukan.

Inisiatif masyarakat tidak hanya berhenti pada penyiapan mekanisme siap siaga bencana, peran dari tokoh-tokoh masyarakat seperti Lurah/Kepala Desa, Ketua RT RW, LSM sangat penting dalam penyiapan ruang evakuasi seperti pembuatan dapur umum dan posko bantuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan responsibilitas yang tinggi terhadap tanggap darurat bencana. ( Asteria & Heruman, 2020) menegaskan bahwa keberhasilan respons awal bencana sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat yang memiliki basis komunitas yang didukung dengan kepercayaan sosial dan gotong royong. Selain itu, kemampuan pemimpin atau tokoh masyarakat dalam mengatur dan manajemen sumber daya yang ada sangat penting, karena masyarakat akan mendengarkan langsung arahan dan instruksi dari pimpinan atau tokoh masyarakat. Dengan demikian, dalam tahap awal merespon tanggap darurat bencana inisiatif masyarakat dapat bekerja dengan optimal dengan dukungan arahan dari Tokoh/Pimpinan masyarakat (Hidayat dan Winarno, 2021). Dalam praktiknya, pola inisiatif ini diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti pendirian dapur umum, pembentukan posko darurat, serta distribusi logistik secara mandiri dengan prioritas kelompok rentan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek terdampak, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam penanganan bencana.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.8731>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

---

### 3.4 Kendala Dalam Respons Masyarakat

Dalam fase awal tanggap darurat banjir di Kabupaten Gresik, keterlibatan masyarakat memang muncul dengan cepat, tapi keadaan di lapangan masih menghadapi banyak keterbatasan sarana pendukung yang cukup terasa. Pada wilayah terdampak luapan Kali Lamong seperti Balongpanggung dan Benjeng, tidak semua desa memiliki akses terhadap alat evakuasi seperti perahu atau pelampung, sehingga proses pemindahan warga kerap dilakukan secara manual dengan berjalan kaki di genangan atau menggunakan alat seadanya. Kondisi ini menjadi lebih kompleks ketika ketinggian air mencapai titik yang menyulitkan mobilitas, sementara kebutuhan evakuasi tetap harus segera dilakukan, khususnya bagi kelompok rentan. Upaya inovatif seperti pemanfaatan perahu sederhana hasil rekayasa lokal memang mulai muncul, tetapi jumlahnya masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah terdampak, sehingga belum mampu menjawab kebutuhan secara keseluruhan. Selain keterbatasan alat, persoalan lain yang muncul, seperti distribusi logistik pada tahap awal kejadian. Bantuan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan perlengkapan darurat tidak selalu langsung tersedia dalam jumlah yang cukup ketika banjir mulai meluas. Dalam beberapa kasus, dapur umum baru dapat beroperasi setelah adanya koordinasi lebih lanjut antara pemerintah desa, BPBD, dan Dinas Sosial, sehingga pada fase awal masyarakat masih mengandalkan persediaan mandiri ataupun bantuan warga sekitar. Data di lapangan juga menunjukkan kapasitas produksi dapur umum yang mampu menyediakan ratusan porsi dalam satu kali masak sebenarnya masih belum sebanding dengan jumlah warga terdampak di beberapa desa, sehingga distribusi bantuan harus dilakukan secara bertahap dan belum menjangkau seluruh kebutuhan secara merata pada waktu yang bersamaan.

Kendala berikutnya ada pada aspek informasi dan koordinasi antar pihak. Meskipun masyarakat memiliki pengalaman menghadapi banjir berulang, arus informasi terkait kondisi terkini seperti ketinggian air, wilayah prioritas evakuasi, maupun jalur aman yang bisa dilalui tidak selalu tersampaikan secara merata. Hal ini menyebabkan sebagian warga mengambil keputusan berdasarkan perkiraan masing-masing tanpa informasi yang jelas dan acuan yang sama. Pada beberapa kondisi hal tersebut justru berpotensi menimbulkan risiko tambahan. Koordinasi antara masyarakat, perangkat desa, dan petugas juga membutuhkan waktu untuk terbentuk secara efektif, terutama ketika banjir terjadi secara tiba-tiba dan menjangkau beberapa desa sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan.

Hambatan akses fisik juga menjadi faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi efektivitas respons masyarakat. Genangan air yang merendam jalan desa hingga jalur penghubung antar wilayah menyebabkan mobilitas menjadi terbatas, bahkan pada beberapa titik akses utama tidak dapat dilalui sama sekali. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses evakuasi, tetapi juga memperlambat masuknya bantuan dari luar, baik dari pemerintah maupun organisasi sosial. Situasi tersebut terlihat pada beberapa kejadian ketika distribusi bantuan harus menunggu hingga kondisi air mulai surut atau memerlukan alat tambahan untuk menjangkau lokasi yang terisolasi. Dampaknya, respons awal yang dilakukan masyarakat harus menyesuaikan dengan keterbatasan akses yang ada, sehingga tidak semua tindakan dapat dilakukan secara optimal dalam waktu yang bersamaan. Di sisi lain, dinamika sosial dalam masyarakat juga menjadi tantangan dalam pembagian peran dan pengelolaan tindakan kolektif. Meskipun gotong royong tetap menjadi kekuatan utama, tidak semua wilayah memiliki pembagian tugas yang jelas sejak awal kejadian, sehingga terdapat potensi tumpang tindih peran atau bahkan kekosongan fungsi pada beberapa aspek tertentu seperti distribusi logistik atau pendataan warga terdampak. Kondisi tersebut biasanya terjadi pada fase awal sebelum struktur penanganan lebih terorganisir terbentuk melalui koordinasi dengan pihak desa atau instansi terkait.

### 3.5 Strategi Penguatan Respons Masyarakat Pada Fase Tanggap Darurat

Penguatan respons masyarakat dalam fase tanggap darurat banjir di Kabupaten Gresik perlu difokuskan pada pembentukan sistem kesiapsiagaan. Selama ini masyarakat menjadi pihak pertama yang bergerak ketika banjir terjadi, terutama di wilayah rawan luapan Kali Lamong seperti Balongpanggung, Benjeng, Cerme, dan Menganti. Namun respons yang muncul masih banyak bergantung pada inisiatif spontan sehingga koordinasi, pembagian tugas, hingga proses evakuasi belum selalu berjalan merata di setiap desa terdampak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa selain masyarakat sendiri, perlu dibentuk kelompok siaga bencana di tingkat desa yang melibatkan RT/RW, karang taruna, perangkat desa, dan relawan lokal agar masyarakat memiliki mekanisme kerja yang lebih jelas sebelum bencana terjadi. Kemudian melakukan penguatan kapasitas yang dapat dilakukan melalui simulasi evakuasi, pelatihan penanganan darurat, pemetaan jalur aman, hingga penyediaan sistem komunikasi sederhana antarwilayah rawan banjir. Langkah tersebut penting karena karakter banjir di Gresik sering berlangsung cepat dan berpindah mengikuti luapan sungai maupun tingginya curah hujan, sehingga masyarakat memerlukan kesiapan yang tidak hanya berbasis pengalaman, tetapi juga didukung sistem yang lebih terstruktur.

Selain penguatan organisasi masyarakat, kesiapan sarana evakuasi dan logistik menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas tanggap darurat. Beberapa kejadian banjir menunjukkan bahwa keterbatasan perahu, akses jalan yang terendam, hingga lambatnya distribusi bantuan masih menjadi hambatan utama di lapangan. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, perlu adanya Inovasi berkelanjutan seperti yang dilakukan PH Gresik bersama Petrokimia Gresik yang membuat sebuah lifeboard. Perahu tersebut dirancang untuk membantu evakuasi maupun distribusi logistik di wilayah genangan dangkal yang sulit dijangkau kendaraan biasa. Di sisi lain, pengoperasian dapur umum oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik serta pembentukan dapur mandiri oleh masyarakat desa juga perlu untuk menunjukkan bahwa kebutuhan dasar warga terdampak memerlukan sistem logistik yang lebih dekat dengan masyarakat.

Penguatan respons masyarakat juga perlu didukung melalui kolaborasi yang lebih terintegrasi antara pemerintah, lembaga sosial, komunitas lokal, dan masyarakat terdampak. Selama penanganan banjir di Gresik, keterlibatan berbagai pihak seperti BPBD, Dinas Sosial, Baznas, organisasi profesi, sekolah, hingga relawan menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak dapat dilakukan secara sektoral. Bantuan sembako dari IDI dan IIDI Gresik, pembukaan donasi oleh Baznas, hingga layanan servis motor gratis yang dilakukan siswa SMK di Cerme menjadi contoh bagaimana masyarakat dan lembaga lokal mampu menyesuaikan bentuk bantuan berdasarkan kebutuhan lapangan. Inisiatif tersebut tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mendukung pemulihan aktivitas masyarakat pascabanjir, terutama ketika akses transportasi dan mobilitas warga terganggu akibat genangan air.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan terhadap peran masyarakat dalam fase tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Gresik, dapat diambil beberapa kesimpulan yakni masyarakat berperan sebagai aktor pertama yang paling responsif dalam fase tanggap darurat. Hal ini dibuktikan melalui respon awal masyarakat berupa upaya evakuasi mandiri yang memprioritaskan kelompok rentan, yakni lansia, anak-anak, dan warga yang mengalami kondisi medis yang serius. Selain itu, pola inisiatif masyarakat dalam menangani bencana banjir cenderung bersifat reaktif namun terstruktur, ditunjukkan dengan keberadaan posko darurat, pendirian dapur umum, serta pembagian tugas mulai dari RT, RW, dan Karang Taruna. Keterlibatan beberapa aktor masyarakat seperti kepala desa dan lurah terbukti menjadi langkah strategis dalam mengarahkan sumber daya dan tindakan kolektif secara efektif. Dasar yang penting dalam menggerakkan solidaritas masyarakat dalam kondisi darurat adalah kepercayaan dan semangat gotong royong. Meskipun respons masyarakat menunjukkan partisipasi yang cenderung positif, terdapat sejumlah kendala yang membatasi efektivitasnya. Kendala ini berupa keterbatasan sarana evakuasi, distribusi logistik yang tidak merata, lemahnya arus informasi yang terstandarisasi, serta hambatan jangkauan fisik akibat genangan yang muncul di berbagai wilayah terdampak. Beberapa kendala tersebut membuktikan bahwa kemampuan respons masyarakat masih memerlukan penguatan sistem agar penanganan tanggap darurat dapat beroperasi secara optimal dan merata. Dari kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat ditawarkan sebagai rekomendasi kebijakan maupun agenda penelitian lanjutan. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Gresik dapat membentuk kelompok siaga bencana yang terstruktur secara formal di tingkat desa, dengan melibatkan RT/RW, Karang Taruna, tokoh masyarakat dan relawan lokal. Pembentukan kelompok tersebut disertai dengan mekanisme operasional yang terstandarisasi, meliputi prosedur evakuasi, peta jalur aman, dan sistem komunikasi antardesa yang rawan banjir. Selain itu, diperlukan penguatan kemampuan sumber daya manusia melalui pelaksanaan simulasi bencana secara berkala dan pelatihan penanganan darurat, khususnya di wilayah yang sering terdampak luapan Kali Lamong dan Kali Surabaya. Selanjutnya adalah pemerintah daerah bersama BPBD perlu mendorong pengembangan inovasi sarana evakuasi lokal yang terjangkau dan dapat diproduksi di tingkat lokal, seperti yang telah dicontohkan melalui inisiatif lifeboard oleh PH Gresik dan Petrokimia Gresik. Distribusi sarana tersebut perlu dilakukan secara merata ke seluruh wilayah rawan banjir supaya tidak terjadi kesenjangan kapasitas antar desa.

#### Reference

- Amalia, Y. N., & Sari, M. M. K. (n.d.). Strategi badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dalam membangun partisipasi masyarakat tanggap bencana banjir di Kabupaten Gresik. Universitas Negeri Surabaya.
- Asteria, D., & Heruman, H. (2020). Community-based disaster management: Peran masyarakat dalam pengelolaan bencana. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Aulady, M. F. N., Nuciferani, F. T., & Agustin, N. (2022). Penyebab dan alternatif mitigasi bencana banjir di Gresik Selatan. *Nama Jurnal*, 7(3), 132–136.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. (2024). Had natural disaster flood, 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. (2024). Had natural disaster flood, 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. (2024). Had natural disaster flood, 2022.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. (2024). Had natural disaster flood, 2023.
- BNPB. (2023). Laporan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.
- Destiana Safitri, Rio A. M. Putra dan Fajar Dewantoro. (2022). Analisis Pola Aliran Banjir pada Sungai Cimadur, Provinsi Banten dengan menggunakan HEC-RAS. *Jurnal of Infrastructural in Civil Engineering*, Vol. (03), No. 01, pp: 19-30
- Firrizqi, M., Zevira, E. C., Hamdasi, K., & Tukiman, T. (2024). Evaluasi Peran Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam Membantu Korban Bencana Banjir di Kabupaten Gresik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 16016-16027.
- Hidayat, S., & Winarno, B. (2021). Kepemimpinan lokal dalam penanggulangan bencana alam. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Parabela. (2020). Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal*, 5(2), 45–53.
- Rahman, F., & Hidayat, T. (2022). Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana alam. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 14(1), 88–96.
- Retnaningrum, P. D. (2023). Pengalokasian barang bantuan pada fase tanggap darurat bencana banjir (Studi kasus: Kabupaten Gresik) [Undergraduate thesis, Universitas Internasional Semen Indonesia]. Repository Universitas Internasional Semen Indonesia. <https://repository.uisi.ac.id/5243/>
- Sari, A. A., Sabilla, A. A., & Hertati, D. (2020). Peran badan penanggulangan bencana daerah dalam manajemen bencana banjir di Kabupaten Gresik. *Syntax Idea*, 2(5), 21-35. <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/252/281>
- Sari, N., & Putra, A. (2021). Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir. *Jurnal Keperawatan STIKES Kendal*, 13(2), 123–130.
- Siswanto, R. D., & Puspaningtyas, A. (2023). Implementasi kebijakan penanggulangan bencana dan mitigasi banjir di Kabupaten Gresik. *Policy and Maritime Review*.